



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 123 Seri E Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 123 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Seri E Nomor 23)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 123) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan BAB I PENDAHULUAN, pada 1.2. Landasan Hukum, dalam LAMPIRAN diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, pada 6.1. Program dan Kegiatan dalam LAMPIRAN diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2024

(BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 13 SERI NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI PURWOREJO NOMOR 123
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo tahun 2021–2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 121 Seri D Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta bidang tata ruang;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPUPR; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas PUPR;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
- e. Bidang Bina Marga;
- f. Bidang Tata Ruang;
- g. UPT;
- h. Jabatan Fungsional.

Adapun tugas setiap bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPUPR serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sedangkan tugas dari setiap subbagian yang berada langsung dibawah Sekretariat adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
- b. menyelenggarakan administrasi pendapatan Daerah; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

2. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam Daerah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam Daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR berkaitan dengan tugas dan fungsi.

3. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pentaan bangunan gedung, dan pengembangan jasa konstruksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di Daerah;
- b. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Daerah;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
- d. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah dan pemberian persetujuan bangunan gedung;
- e. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- f. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
- g. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- h. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR berkaitan dengan tugas dan fungsi.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, dan penyelenggaraan jalan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
- b. penyelenggaraan jalan Kabupaten; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR terkait dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan penataan ruang. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;

- d. koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR berkaitan dengan tugas dan fungsi.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

7. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dengan tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DPUPR sesuai dengan wilayah kerja dan fungsi yang meliputi:

- a. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan drainase;
- c. pelaksanaan pengawasan bangunan dan tata ruang;
- d. pelaksanaan operasi irigasi dan pemeliharaan irigasi;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan camat dan unit kerja terkait di tingkat kecamatan di wilayah kerjanya;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan UPT; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo tersebut, berdasarkan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jabatan struktural dan fungsional yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

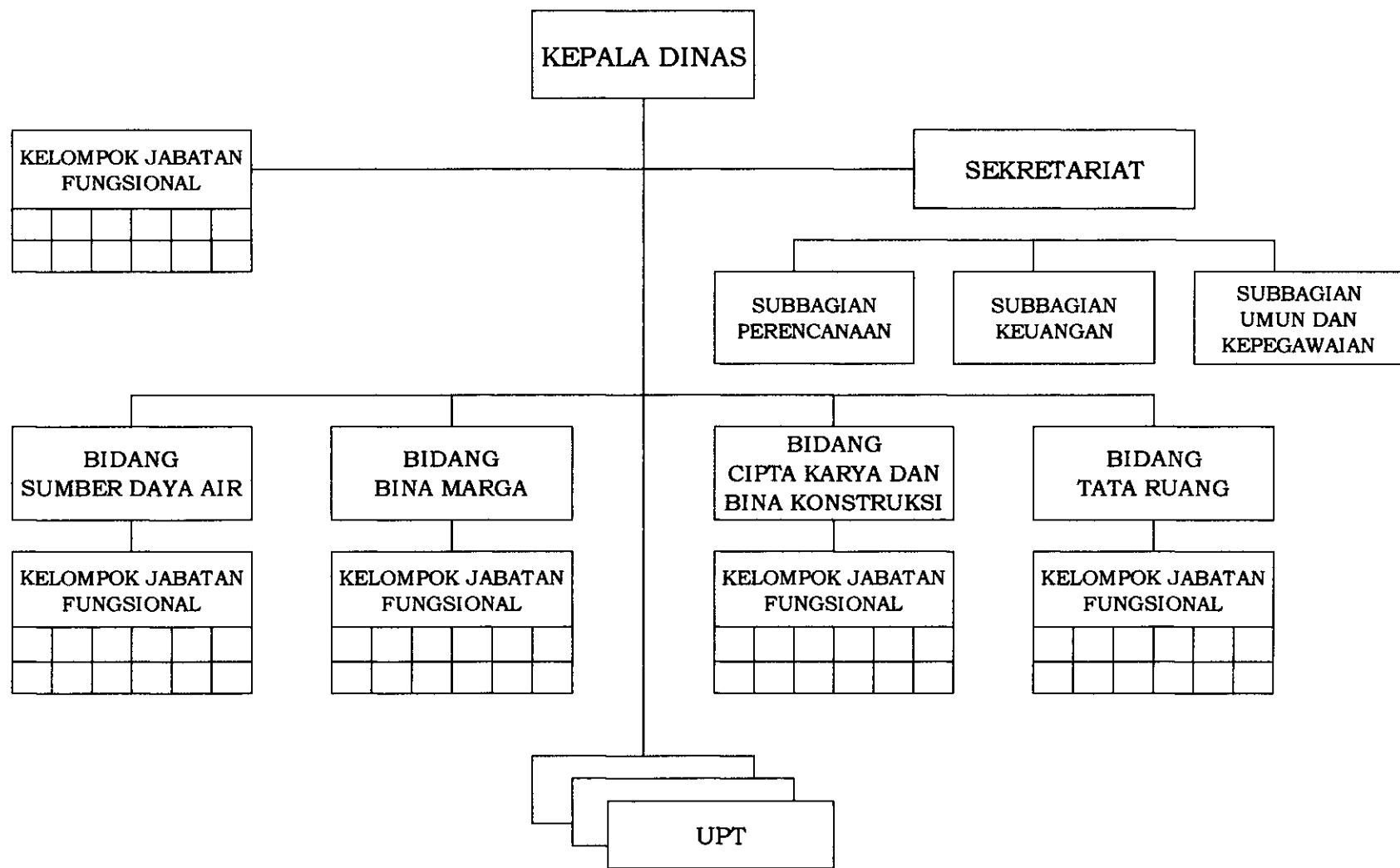
Tabel 2.1
Jabatan Struktural dan Fungsional
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purworejo

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Eselon II.B (Kepala Dinas)	1	
2.	Eselon III.A (Sekretaris Dinas)	1	
3.	Eselon III.B (Kepala Bidang)	4	
4.	Eselon IV.A (Kepala Seksi/ Subbag/UPT)	18	
5.	Eselon IV.B (Sekretaris UPT)	5	
6.	Jabatan Fungsional Umum	96	Administrasi: 29 Teknis: 67
7.	Jabatan Fungsional Tertentu	23	
Jumlah		148	

Sumber: Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

Untuk pembagian pegawai pada masing-masing bidang dan UPT akan dijelaskan pada subbab 2.2.

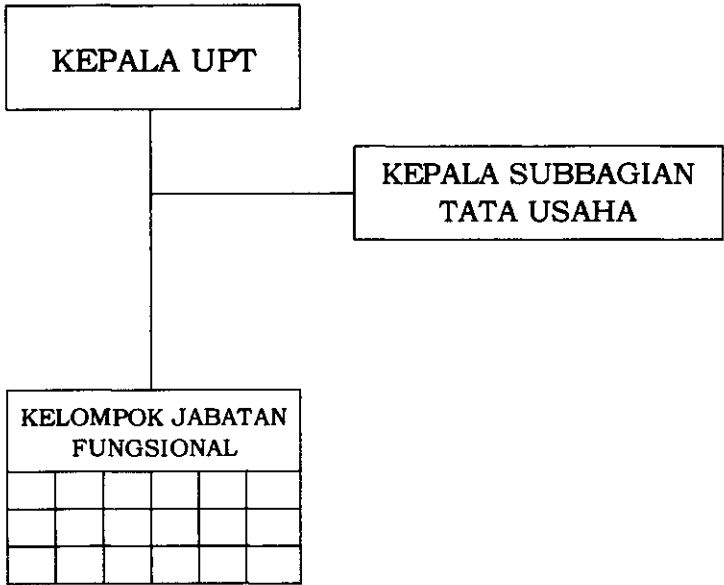
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

**BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 113 Tahun 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO



Gambar 2.2. Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada pelaksanaan visi dan misi dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Terpilih periode Tahun 2021-2025, yaitu:

VISI : “Purworejo Berdaya Saing 2025”

sedangkan pelaksanaan misi yang didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

Misi 2: “Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri”

Misi 3: “Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industry serta potensi pariwisata dan seni budaya”

Misi 4: “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)”

Misi 5: “Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi”

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1.1 Tujuan

Berdasarkan hasil telaah terhadap visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Terpilih periode Tahun 2021-2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengimplimentasikan dalam tujuan-tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dalam 5 tahun mendatang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten
2. Peningkatan pelayanan penataan ruang
3. Peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum
4. Peningkatan pelayanan publik

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dalam 5 tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Irigasi
2. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)
3. Meningkatnya cakupan layanan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat
4. Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung
5. Meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi
6. Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Untuk lebih lengkapnya, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel T-C.25

Tabel 4.1 (Tabel T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purworejo

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Pelayanan Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten		Indeks Pertanaman (IP)	219	219,5	220	220,5	221
		Meningkatnya kinerja pelayanan Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	67	67,75	68,5	69,25	70
2	Peningkatan pelayanan penataan ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	58	62,33	89,61	89,70	89,76
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	58	62,33	89,61	89,70	89,76
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur bidang pekerjaan umum		Persentase peningkatan kualitas pelayanan infastruktur bidang pekerjaan umum	81,42	82,92	86,06	87,65	87,95
		Meningkatnya cakupan layanan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat	Persentase layanan air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat	61,42	62,12	66,33	66,63	66,82
		Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio Kepatuhan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten	100	100	100	100	100

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	83,33	87,63	94,95	100	100
		Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	80,93	81,95	82,96	83,98	85
4	Peningkatan pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,35	81,45	81,60	81,75	82
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,35	81,45	81,60	81,75	82

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dapat menjelaskan indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif beserta sumbernya baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN.

Program prioritas utama yang dilaksanakan di Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Program Penataan Bangunan Gedung
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
10. Program Penyelenggaraan Jalan
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing-masing program tersebut diatas dapat dijelaskan pada tabel program kegiatan berikut.

Tabel 6.1 (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Batasan Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Batasan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		UR	S/P U	PRO	KDU	SUB K				2020 Realisasi	2021 Realisasi*	2022		2023		2024		2025		2026					
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Peningkatan Pelayanan Irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten							Indeks Pertanaman (IP)	Indeks	218	218,6	219		219,6		220		220,6		221		221				
	Meningkatnya kinerja pelayanan irigasi						Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Indeks	66,5	66,28	67		67,78		68,6		69,28		70		70				
		1.	03.	02.			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DATA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	62,43	62,43	64,82	30.269.000.000	66,02	21.819.000.000	67,22	23.948.000.000	68,42	24.615.000.000	69,62	24.648.000.000	69,62	126.319.000.000	DPUPR	Kab. Pwj
		1.	03.	02.	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Dokumen Pengelolaan SDA dalam 1 (Satu) Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen				3	160.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	12	220.000.000	DPUPR	Kab. Pwj	
								Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA dalam 1 (Satu) Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen					3		1		1		1		6			
		1.	03.	02.	2.01.	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					2	20.000.000							2	20.000.000	DPUPR	Kab. Pwj
		1.	03.	02.	2.01.	0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen							2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	60.000.000	DPUPR	Kab. Pwj
		1.	03.	02.	2.01.	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					1.000	100.000.000	sub kegiatan dimutakhirkan menjadi Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (1.03.02.2.02.0030)					1.000	100.000.000	DPUPR	Kab. Pwj	
		1.	03.	02.	2.01.	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					45	40.000.000	sub kegiatan dimutakhirkan menjadi Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi (1.03.02.2.02.0034)					45	40.000.000	DPUPR	Kab. Pwj	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		UR	B/P D	PRO	KBO	SKP K				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
																						Realisasi	Realisasi*			
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		1.	03.	02.	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Permukaan	%			81,06	20.269.000.000	82,06	21.689.000.000	83,06	23.948.000.000	84,06	24.596.000.000	85,06	24.628.000.000	85,06	128.099.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj	
								Persentase Kondisi Saluran Irigasi Di Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%			81,06		82,06		83,06		84,06		85,06		85,06				
		1.	03.	02.	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen					5	300.000.000							5	300.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj	
		1.	03.	02.	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen							5	310.000.000	5	320.000.000	5	330.000.000	15	960.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj	
		1.	03.	02.	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM					0,3	1.000.000.000							0,3	1.000.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj	
		1.	03.	02.	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM							0,3	1.000.000.000	0,3	1.000.000.000	0,3	1.000.000.000	0,9	3.000.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj	
		1.	03.	02.	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM			2	26.274.243.124	2	16.319.000.000							4	42.593.243.124	DPUPR	Kab. Pwrtj	
		1.	03.	02.	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM							2	12.920.115.000	2	13.357.115.000	2	13.035.115.000	6	39.312.345.000	DPUPR	Kab. Pwrtj	
		1.	03.	02.	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung													0		DPUPR	Kab. Pwrtj	
		1.	03.	02.	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung							1	5.432.885.000	1	5.432.885.000	1	5.432.885.000	3	16.298.655.000	DPUPR	Kab. Pwrtj	
		1.	03.	02.	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM			288	3.764.194.800	288	3.950.000.000							288	7.714.194.800	DPUPR	Kab. Pwrtj	
		1.	03.	02.	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM							288	4.050.000.000	288	4.250.000.000	288	4.590.000.000	288	12.890.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj	
		1.	03.	02.	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Unit			6	230.562.075	6	90.000.000							6	320.562.075	DPUPR	Kab. Pwrtj	
		1.	03.	02.	2.02	0034	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Unit							7	135.000.000	7	135.000.000	7	140.000.000	7	410.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj	
		1.	03.	02.	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga							40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	120	300.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj	

Tajuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tajuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		UR	B/P D	PRO	KRO	SUB K				2020 Realisasi	2021 Realisasi*	2022		2023		2024		2025		2026					
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1.	03.	12.	2.01.	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Laporan									1	50.000.000	1	35.000.000	2	85.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj
		1.	03.	12.	2.01.	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Dokumen											1	50.000.000	1	50.000.000		
		1.	03.	12.	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersebutnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1	401.000.000	1	113.000.000	2	268.000.000	2	181.000.000	2	230.000.000	8	1.190.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1		1		2		2		2		8			
		1.	03.	12.	2.02.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen							sub kegiatan dimutakhirkan menjadi Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota (1.03.12.2.01.0009)						0		DPUPR	Kab. Pwrtj
		1.	03.	12.	2.02.	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen			2	401.000.000	2	113.000.000							4	514.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj
		1.	03.	12.	2.02.	0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta							1	100.000.000	1	81.000.000	1	100.000.000	3	281.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj
		1.	03.	12.	2.02.	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen							1	165.000.000	1	100.000.000	1	130.000.000	3	395.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj
		1.	03.	12.	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersebutnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1	50.000.000	2	100.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	9	300.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1		2		2		2		2		9			
		1.	03.	12.	2.03.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen			1	50.000.000	1	50.000.000							2	100.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj
		1.	03.	12.	2.03.	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen							1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj
		1.	03.	12.	2.03.	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kespasialan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan							20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	60	75.000.000	DPUPR	Kab. Pwrtj

Tujuan Perangkat Daerah	Basis Perangkat Daerah	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Areal Pelaksanaan		Target Kinerja Program dan Kewenangan Pelaksanaan												Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
		No	Kode	Uraian	M 6.06				Realisasi	Realisasi ¹⁾	2022			2023			2024			2026					Target	Page (Rp)	Target	Page (Rp)
											Target	Page (Rp)	Target	Page (Rp)	Target	Page (Rp)	Target	Page (Rp)	Target	Page (Rp)	Target	Page (Rp)						
1	2	03	12	2.03	02	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		1.	03	12	02		Sistem Informasi Penataan Ruang yang Dibiayai dari dan Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen			1	50.000.000		1	50.000.000	Sistem Informasi Penataan Ruang sudah diambil alih pemerintahan pusat melalui GISTARU ATR/BPN sehingga sub kegiatan tidak dilaksanakan lagi								1	50.000.000	Kab. Perj		
		1.	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			2	60.000.000		4	115.000.000		4	65.000.000	4	65.000.000	15	370.000.000		Kab. Perj				
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Ruang Daerah	Dokumen			2			4			4				15			Kab. Perj				
		1.	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen			1	45.000.000		1	50.000.000	Sub kegiatan tidak dilanjutkan karena Penda belum bisa menjalankan subbag itu sebelum tahun 2027 (sesuai arahan Kementerian ATR/BPN)								1	50.000.000	Kab. Perj		
		1.	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan dan Pengawasan Hukum bidang Penataan Ruang	Dokumen			1	45.000.000		1	25.000.000						2	70.000.000		Kab. Perj				
		1.	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kewajiban Kegiatan Pemertan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen								1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000		Kab. Perj					
		1.	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus			10	15.000.000		10	15.000.000						20	30.000.000		Kab. Perj				
		1.	03	12	2.04	0007	Penggunaan Sarana Administratif untuk pelayanan publik	Kasus								10	10.000.000	10	10.000.000	30	30.000.000		Kab. Perj					
		1.	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan							1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000		Kab. Perj				
		1.	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan KTR	Dokumen							1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000		Kab. Perj				
		1.	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen					1	25.000.000	Mutuannya sudah tercapai di Sub Kog 2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, sehingga sub kegiatan tidak dilanjutkan								1	25.000.000	Kab. Perj			
Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur bidang pekerjaan umum							Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Bidang pekerjaan umum	%	78,99	80,11	81,43		82,92		84,43		86,28		87,13	97,13								

5

Tujuan Perangkat Daerah	Sebaran Perangkat Daerah	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Bentuk	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lembar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		No	D / M	ORG	M B O S				2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									Realisasi	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Tahun Perangt Daerah	Materi Perangt Daerah	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Areal Pelaksanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangt Daerah	Unit Kerja Perangt Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		No	D.4/a	001	002				003	2020 Realisasi	2021 Realisasi	2022			2023			2024			2025								
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)						
1	2	1.	03.	03.	2.01.	05	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Kab. Perj	DPUPR	Kab. Perj		
		1.	03.	03.	2.01.	06			SR			829	11.440.000.000													Kab. Perj	DPUPR	Kab. Perj	
		1.	03.	03.	2.01.	0026																				Kab. Perj	DPUPR	Kab. Perj	
		1.	03.	03.	2.01.	07			SR			555	3.550.000.000	555	4.550.000.000	7,5	7.849.000.000	7,5	8.217.000.000	7,5	8.185.000.000	22,5	24.251.000.000			Kab. Perj	DPUPR	Kab. Perj	
		1.	03.	03.	2.01.	19			SR			500	1.000.000.000													Kab. Perj	DPUPR	Kab. Perj	
		1.	03.	03.	2.01.	0032			SR							555	4.550.000.000	555	4.550.000.000	555	4.550.000.000	1665	13.650.000.000			Kab. Perj	DPUPR	Kab. Perj	
		1.	03.	03.	2.01.	11			Kelompok Masyarakat			44	25.000.000	40	25.000.000												Kab. Perj	DPUPR	Kab. Perj
		1.	03.	03.	2.01.	0023			Lembaga							40	25.000.000	40	25.000.000	40	25.000.000	120	75.000.000			Kab. Perj	DPUPR	Kab. Perj	
		1.	03.	03.	2.01.	14			Pengelolaan SPAM			88	16.500.000	80	16.500.000												Kab. Perj	DPUPR	Kab. Perj
		1.	03.	03.	2.01.	0024			Orang							80	16.500.000	80	16.500.000	80	16.500.000	240	49.500.000			Kab. Perj	DPUPR	Kab. Perj	
		1.	03.	03.	2.01.	15			Unit			1	200.000.000	1	200.000.000												Kab. Perj	DPUPR	Kab. Perj

Tujuan Perangkat Daerah	Sumber Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
		UR	B/P U	PBG	KBO	SUB K				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2020	2021				
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)						
																										Realisasi	Realisasi(*)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
								Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTL) yang Disusun	Dokumen			1		1		1		1		1		5					
		1.	03.	09.	2.01.	01	Perencanaan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dokumen			1	200.000.000	1	144.000.000							2	344.000.000	DPUPR	Kab. Purj		
		1.	03.	09.	2.01.	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen							1	158.000.000	1	163.000.000	1	162.000.000	3	483.000.000	DPUPR	Kab. Purj		
	Meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi							Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten	%	78,51	78,51	83,33		87,68		92,68		97,73		100		100					
		1.	03.	11.			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	68,18	68,18	75	120.000.000	79,58	87.000.000	86,36	98.000.000	93,18	98.000.000	100	97.000.000	100	497.000.000	DPUPR	Kab. Purj		
								Rasio Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	%	58,33	58,33	75		83,33		91,67		100		100		100					
								Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	100	100	100		100		100		100		100		100					
		1.	03.	11.	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Tenaga Terampil Konstruksi	Orang			10	37.500.000	10	32.000.000	10	38.000.000	10	38.000.000	10	37.000.000	60	179.500.000	DPUPR	Kab. Purj		
								Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	Orang			10		10		10		10		10		60					
		1.	03.	11.	2.01.	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang			10	37.500.000	10	32.000.000							20	69.500.000	DPUPR	Kab. Purj		
		1.	03.	11.	2.01.	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang							10	35.000.000	10	38.000.000	10	37.000.000	30	110.000.000	DPUPR	Kab. Purj		
		1.	03.	11.	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1	20.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	55.000.000	DPUPR	Kab. Purj		

Tahun Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tertentu/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
		IS	a / w	OM				M / B	2020 Realisasi	2021 Estimasi	2022			2023			2024			2025							
											Target	Page (Rp)	Target	Page (Rp)	Target	Page (Rp)	Target	Page (Rp)	Target	Page (Rp)	Target			Page (Rp)	Target	Page (Rp)	Target
1	2	1.	03.	10.	2.01.01	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Pengembangan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advia dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen						10	1.150.000.000													Kab. Perj
		1.	03.	10.	2.01.0029	4	5	6							10	1.265.000.000	10	1.391.500.000	2.216.800.000	30	4.873.300.000						Kab. Perj
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Pengembangan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Pengembangan Jalan dan Jembatan yang Disusun dan Lembar yang Tersedia untuk Pengembangan Jalan Perangkat Jalan yang Dibangun	M ²	1.000	5.050.000.000												1.000	5.050.000.000	DRUPR	Kab. Perj			
		1.	03.	10.	2.01.02	4	5	6													2	14.541.425.000	DRUPR	Kab. Perj			
					Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	KM	1	4.982.685.000				1	9.658.740.000													Kab. Perj
		1.	03.	10.	2.01.0032	4	5	6													1,5	12.658.740.000	DRUPR	Kab. Perj			
					Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan yang Dibangun	KM								1	9.658.740.000	0,5	3.000.000.000									Kab. Perj
		1.	03.	10.	2.01.03	4	5	6													1	100.000.000	DRUPR	Kab. Perj			
					Pengelolaan Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Lajur Jalan	Dokumen								1	100.000.000											Kab. Perj
		1.	03.	10.	2.01.0028	4	5	6													3	300.000.000	DRUPR	Kab. Perj			
					Pengelolaan Jalan	Jumlah Dokumen Lajur Jalan yang Dikelola	Dokumen																				Kab. Perj
		1.	03.	10.	2.01.04	4	5	6													3	1.164.000.000	DRUPR	Kab. Perj			
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	2	97.000.000				1	1.067.000.000													Kab. Perj
		1.	03.	10.	2.01.0043	4	5	6													3	3.531.770.000	DRUPR	Kab. Perj			
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Penjangkauan Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM								1	1.067.000.000	1	1.173.700.000	1.291.070.000	3	3.531.770.000	DRUPR	Kab. Perj				
		1.	03.	10.	2.01.06	4	5	6													0		DRUPR	Kab. Perj			
					Pelebaran Jalan Meninjau Standar	Pelebaran Jalan yang Dilakukan Pelebaran Meninjau Standar	KM																				Kab. Perj
		1.	03.	10.	2.01.0037	4	5	6													1	4.944.098.000	DRUPR	Kab. Perj			
					Pelebaran Jalan Meninjau Standar	Pelebaran Jalan yang Dilakukan Pelebaran Meninjau Standar	KM																				Kab. Perj
		1.	03.	10.	2.01.08	4	5	6													21,74	107.488.040.919	DRUPR	Kab. Perj			
					Rekonstruksi Jalan	Pelebaran Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	13,59	67.186.263.919				8,15	40.303.777.000													Kab. Perj
		1.	03.	10.	2.01.0033	4	5	6													38.811.168.000	22,11	109.305.560.000	DRUPR	Kab. Perj		
					Rekonstruksi Jalan	Pelebaran Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM								6,3	31.137.260.000	7,96	39.387.132.000	7,85								Kab. Perj
		1.	03.	10.	2.01.09	4	5	6																			Kab. Perj
					Rehabilitasi Jalan	Pelebaran Jalan yang Dilakukan Rehabilitasi Jalan	KM	9,14	45.181.105.642				10,56	52.193.515.000							19,7	97.374.620.642	DRUPR	Kab. Perj			
		1.	03.	10.	2.01.0044	4	5	6													34,18	166.990.480.000	DRUPR	Kab. Perj			
					Rehabilitasi Jalan	Pelebaran Jalan yang Dilakukan Rehabilitasi Jalan	KM								10,71	52.957.687.000	14,15	69.956.373.000	9,52	46.078.440.000							Kab. Perj
		1.	03.	10.	2.01.10	4	5	6													3,95	10.356.852.000	DRUPR	Kab. Perj			
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Pelebaran Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	1,96	2.977.360.000				2	7.379.492.000													Kab. Perj
		1.	03.	10.	2.01.0034	4	5	6													7	30.280.946.000	DRUPR	Kab. Perj			
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Pelebaran Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM								2	8.597.108.000	2,5	10.015.630.000	2,5	11.668.208.000							Kab. Perj
		1.	03.	10.	2.01.11	4	5	6													590	45.135.183.600	DRUPR	Kab. Perj			
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Pelebaran Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	270	20.023.411.600				320	25.111.772.000													Kab. Perj

Tahun Perangkat Daerah	Sumber Perangkat Daerah	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tugas/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Bentuk	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah			Unit Kerja Perangkat Daerah Peninggalan Jumlah								
		ID	D d / M	Okt	M Mei				2020 Realisasi	2021 Realisasi*	2022			2023			2024			2025			2026			Target	Page (Rp)		2027	Page (Rp)	Target	Page (Rp)	2028	Page (Rp)	Target	Page (Rp)
											Target	Page (Rp)	2029	Target	Page (Rp)	2030	Target	Page (Rp)	2031	Target	Page (Rp)	2032	Target	Page (Rp)	2033											
1	2	03	01	2.01	07	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	11	Kab. Perj	12	18 000.000	DPUPR	Kab. Perj				
		03	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan								6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	18	30.000.000	DPUPR	Kab. Perj	18	30.000.000	DPUPR	Kab. Perj					
		03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Tertayarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kab. Perj			
		03	01	2.02	01		Pengadaan Oaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Oaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	150			150	9.084.090.820	144	9.905.340.351							150	18.989.436.171	DPUPR	Kab. Perj	150	18.989.436.171	DPUPR	Kab. Perj					
		03	01	2.02	0001		Pengedinas Oaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Oaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan								134	10.627.130.041	127	11.036.693.294	118	11.201.812.020	134	32.865.635.355	DPUPR	Kab. Perj	134	11.201.812.020	DPUPR	Kab. Perj					
		03	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				6	1.000.000	6	1.000.000							12	2.000.000	DPUPR	Kab. Perj	12	2.000.000	DPUPR	Kab. Perj					
		03	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan							6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	18	3.000.000	DPUPR	Kab. Perj	18	3.000.000	DPUPR	Kab. Perj						
		03	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan				26	15.000.000	24	16.000.000							50	31.000.000	DPUPR	Kab. Perj	50	31.000.000	DPUPR	Kab. Perj					
		03	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan							24	18.000.000	24	18.000.000	24	18.000.000	72	54.000.000	DPUPR	Kab. Perj	72	54.000.000	DPUPR	Kab. Perj						
		03	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	Tertayarnya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	%	100			100	44.000.000	100	45.000.000	100	80.000.000	100	81.000.000	100	81.000.000	100	241.000.000	DPUPR	Kab. Perj	100	81.000.000	DPUPR	Kab. Perj					
									Pemertaaan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	%				100		100		100		100				100												

Tipean Perangkat Daerah	Sumber Perangkat Daerah	Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Ajaran Pelaksanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		RD	D 2/U	D 3	D 4				2020		2021		2022			2023			2024			2025						2026		
									Realisasi	Realisasi	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				Target	Pagu (Rp)	Target
1	2	1.	03.	01.	2.03.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Kab. Perj					
		1.					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan			1	6.000.000	1	6.000.000							2	12.000.000			DRUPR	Kab. Perj				
		1.	03.	01.	2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan							1	7.000.000	1	7.000.000			3	21.000.000			DRUPR	Kab. Perj				
		1.	03.	01.	2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			2	8.000.000	2	8.000.000							4	16.000.000			DRUPR	Kab. Perj				
		1.	03.	01.	2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan							2	9.000.000	2	9.000.000			6	27.000.000			DRUPR	Kab. Perj				
		1.	03.	01.	2.03.07		Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			1	30.000.000	1	31.000.000							2	61.000.000			DRUPR	Kab. Perj				
		1.	03.	01.	2.03.0007		Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen							1	34.000.000	1	35.000.000			3	104.000.000			DRUPR	Kab. Perj				
		1.	03.	01.	2.04		Administrasi Pendataan Daerah Kerjasama Perangkat Daerah	%			100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	10.000.000			DRUPR	Kab. Perj				
							Penelitian Layanan Administrasi Pendataan Daerah Kerjasama Perangkat Daerah	%			100		100		100						100									
		1.	03.	01.	2.04.07		Pelaporan Pengeluaran Retribusi Daerah	Dokumen			1	2.000.000	1	2.000.000							2	4.000.000			DRUPR	Kab. Perj				
		1.	03.	01.	2.04.0007		Pelaporan Pengeluaran Retribusi Daerah	Dokumen							1	2.000.000	1	2.000.000			3	6.000.000			DRUPR	Kab. Perj				
		1.	03.	01.	2.05		Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	%			100	38.000.000	100	39.000.000	100	43.000.000	100	44.000.000	100	44.000.000	100	208.000.000			DRUPR	Kab. Perj				
							Penelitian Layanan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	%			100		100		100						100									
		1.	03.	01.	2.05.03		Pendataan dan Pengeluaran Administrasi Kepengawasan	Dokumen			4	3.000.000	4	3.000.000							8	6.000.000			DRUPR	Kab. Perj				
		1.	03.	01.	2.05.0003		Pendataan dan Pengeluaran Administrasi Kepengawasan	Dokumen							4	3.000.000	4	3.000.000			12	9.000.000			DRUPR	Kab. Perj				

[illegible]

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
		UR	S/P/D	PRG	KBO	SUB K				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Pagu (Rp)		
												Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1.	03.	01.	2.09.	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit							17	4.000.000	17	4.000.000	17	4.000.000	17	12.000.000	DPUPR	Kab. Pwjt
		1.	03.	01.	2.09.	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha			0,975	7.000.000	0,975	7.000.000							0,975	14.000.000	DPUPR	Kab. Pwjt
		1.	03.	01.	2.09.	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha							0,975	8.000.000	0,975	8.000.000	0,975	8.000.000	0,975	24.000.000	DPUPR	Kab. Pwjt
							TOTAL						280.559.090.820		283.731.343.361		279.820.130.041		284.665.693.294		273.670.312.020		1.372.447.071.826		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang. Indikator ini harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo kedepan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Prestasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja juga akan digunakan dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga nilainya merupakan sesuatu yang terukur, oleh karena itu dalam penetapan indikator kinerja diharapkan dapat

menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021*)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INDIKATOR TUJUAN:								
1	Indeks Pertanaman (IP)	218	218	219	219,5	220	220,5	221	221
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	51,67	51,67	58,00	62,33	89,61	89,70	89,76	89,76
3	Persentase peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum	78,59	78,59	81,42	82,92	86,06	87,65	87,95	87,95
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,29	81,29	81,35	81,45	81,60	81,75	82	82
	INDIKATOR SASARAN:								
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	65,50	65,50	67,00	67,75	68,50	69,25	70,00	70,00
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	51,67	51,67	58,00	62,33	89,61	89,70	89,76	89,76
3	Persentase layanan air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat	59,95	59,95	61,42	62,12	66,33	66,63	66,82	66,82
4	Rasio Kepatuhan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelayanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	75,51	75,51	83,33	87,63	94,95	100	100	100
6	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	78,89	78,89	80,93	81,95	82,96	83,98	85,00	85,00
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,29	81,29	81,35	81,45	81,60	81,75	82,00	82,00

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021*)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INDIKATOR PROGRAM:								
1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	62,43	62,43	64,82	66,02	67,22	68,42	69,62	69,62
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata ruang (RTR)	64,20	65,80	67,80	69,80	89,61	89,70	89,76	89,76
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	92,51	92,51	96,30	97,77	99,24	100,00	100,00	100,00
4	Persentase ketersediaan sarana prasarana persampahan	2,63	2,63	3,04	3,44	4,25	4,25	4,66	4,66
5	Persentase RT yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84,70	84,70	84,93	85,16	95,50	95,64	95,79	95,79
6	Persentase bangunan milik daerah dengan kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Rasio rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang disusun	0,00	0,00	12,50	37,50	62,50	87,50	100	100
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	68,18	72,73	75,00	79,55	93,18	100	100	100
9	Rasio ketersediaan informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	58,33	58,33	75,00	83,33	91,67	100	100	100
10	Persentase Badan Usaha yang tertib dalam usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	28,21	28,21	29,79	31,23	32,67	34,11	35,55	35,55

2

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021*)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sedang	78,89	78,89	80,93	81,95	82,96	83,98	85,00	85,00
13	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan:

*) Capaian s.d triwulan II (Semester I) Tahun 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI